

TEORI PUBLIC SPHERE DALAM KOMUNIKASI POLITIK

Kianti Azizah

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Indonesia
kianti.azizah21@ui.ac.id

Abstrak

Ruang public atau public sphere merupakan ruang berdiskusi yang menurut Habermas dikatakan ideal jika terbuka untuk semua masyarakat tanpa memperhatikan posisi kelas sosialnya, setiap partisipan memiliki kesempatan yang sama untuk saling memengaruhi melalui argumen mereka, dan ketidakadaan hierarki pada proses berlangsungnya ruang public. Komunikasi politik merupakan objek kajian ilmu politik karena pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yakni berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan, dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukannya sebagai pelaku kegiatan politik. Ruang public dalam komunikasi politik menjadi objek dari penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan menggunakan library research yang merupakan pendekatan dengan teknik pengumpulan data melalui sumber-sumber kepustakaan yang memiliki relevansi kajian penelitian dengan menggunakan in depth analysis. Penelitian ini menunjukkan ruang public dapat terjadi dalam ranah komunikasi politik. Jika sebelumnya ruang public lebih bersifat langsung, saat ini ruang public cenderung terbentuk pada ranah digital. Namun, pada prakteknya, jika disesuaikan dengan indikator yang dikemukakan oleh Habermas, hampir tidak ditemukan ruang public yang ideal dan memenuhi syarat seluruh indikator.
Kata Kunci: Public Sphere; Komunikasi Politik; Jürgen Habermas; Kualitatif.

Abstract

Public space or public sphere is a discussion space which according to Habermas is said to be ideal if it is open to all people regardless of social class position, each participant has the same opportunity to influence each other through their arguments, and there is no hierarchy in the process of public space. Political communication is an object of study in political science because the messages expressed in the communication process have political characteristics, namely relating to the political power of the state, government, and also the activities of the communicator in his position as a perpetrator of political activities. Public space in political communication is the object of this research. The research was carried out using library research, which is an approach using data collection techniques through library sources that have relevance to research studies using in-depth analysis. This research shows that public space can occur in the realm of political communication. If previously public space was more direct, now public space tends to be formed in the digital realm. However, in practice, if we adjust it to the indicators put forward by Habermas, we can hardly find ideal public spaces that meet the requirements of all the indicators.
Keywords: Public Sphere; Political Communication; Jürgen Habermas; Qualitative.

PENDAHULUAN

Public sphere atau ruang public merupakan konsep yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas pada tahun 1989 melalui *The Structural Transformation of The Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Ruang public sendiri berasal dari kata ruang atau sphere. Dalam bahasa Yunani, ruang public merupakan ruang atau tempat orang-orang bisa berdiskusi, duduk berkonsultasi, duduk di pengadilan atau bahkan dimana orang bisa melakukan

tindakana bersama.¹

Perubahan kultur masyarakat dalam menanggapi regulasi maupun realitas politik pada abad ke-18 disinyalir sebagai awal terbentuknya public sphere atau ruang public. Habermas juga mengungkapkan bahwa ruang public adalah suatu lingkup individu privat yang terhimpun membentuk suatu public yang bisa menjalankan diskusi secara rasional, membentuk opini, serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah.²

Baru-baru ini, terdapat beberapa peristiwa yang kembali menciptakan ruang public. Salah satunya adalah peristiwa perpisahan dengan Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengakhiri masa jabatannya pada Minggu, 16 Oktober 2022. Perpisahan Anies pada Jumat, 14 Oktober 2022 dilakukan dengan beragam kegiatan. Salah satu kegiatan yang ada adalah diskusi mendadak dengan Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA). Dilansir dari republika.co.id, Anies mengajak partisipan untuk duduk di depan pintu gerbang Balai Kota Jakarta dan berdiskusi secara terbuka dengan pengunjung rasa. Ditemani oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria, mereka berbicara dengan partisipan secara terbuka membahas isu-isu di Jakarta. Pada diskusi yang terjadi, terlihat bahwa semua partisipan dapat menyampaikan pendapat, opini, keluhan, dan berkomentar secara langsung. Anies maupun Riza juga mendapatkan kesempatan untuk langsung menanggapi pertanyaan dan komentar dari partisipan. Pada situasi ini, Anies dan Riza tampak berusaha mewadahi public untuk berbicara secara langsung serta membangun ruang public bagi partisipan yang ada disitu.

Selain itu, ada juga Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang menciptakan ruang public secara digital melalui sosial media khususnya facebook yang dimilikinya. Pada facebook tersebut, Ridwan Kamil gemar mengunggah post dengan tema tertentu untuk kemudian ditanggapi oleh masyarakat. Salah satu postingnya yang dikutip dari Zaenudin bertema “Terstruktur, Masif, dan Berkelanjutan”. Pada post tersebut, masyarakat bebas menyuarakan pendapat, opini, hingga keluhan yang dimiliki.³ Komentar masyarakat yang dianggap penting juga akan ditanggapi sehingga kerap muncul diskusi pada unggahan dari Ridwan Kamil.

Subiakto menjelaskan bahwa suatu komunikasi yang tampaknya pesan atau isinya bukan tentang politik, namun secara potensial dan actual dapat berakibat atau mempunyai konsekuensi dalam suatu fungsi system politik bisa dikatakan sebagai komunikasi politik.⁴ Konsekuensi

¹ Jurgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (MIT Press, 1991), H. 3-4.

² Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*.

³ H N Zaenudin dan S Suwatno, “Ridwan Kamil’s Digital Public Sphere and Public Policy,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 145 (April 2018): 012007, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/145/1/012007>.

⁴ H. Subiakto dan R. Ida, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2012).

politik menjadi unsur utama yang membedakan komunikasi politik dengan jenis komunikasi lainnya.

Fenomena ruang public atau public sphere ini di tengah masyarakat merupakan suatu hal yang menarik. Hal ini menjadi penting untuk diteliti ketika public sphere tersebut diaplikasikan dalam komunikasi politik di tengah masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka diputuskan penyusunan jurnal penelitian yang bertujuan yang berjudul Teori Public Sphere dalam Komunikasi Politik yang bertujuan untuk: 1) mencari tahu dan mendeskripsikan bagaimana implementasi teori public sphere ini dalam komunikasi politik; 2) mencari relevansi antara teori lama dengan peristiwa baru.

TINJAUAN LITERATUR

Penulisan ini akan menggunakan teori public sphere dalam komunikasi politik. Konsep tentang ruang public ini tidak terlepas dari Jürgen Habermas yang merupakan seorang filsuf kontemporer dan ahli teori sosial dari Jerman. Habermas dalam gagasannya terkait ruang public mengatakan adanya public sphere menyaratkan keaktifan dari masyarakat yang memanfaatkan hak-haknya untuk ikut terlibat berpikir di dalam suatu wacana yang sedang hangat pada suatu waktu tertentu khususnya berkaitan dengan permasalahan politik.

Habermas mendefinisikan tiga kriteria sebagai syarat dinyatakan public sphere yang berhasil. Pertama, terbuka untuk semua masyarakat tanpa memperhatikan posisi kelas sosialnya. Penghubung dari ruang public ini bukan terletak pada kelas sosial, melainkan keinginan bersama untuk mendiskusikan isu-isu yang sesuai dengan ketertarikan public. Kedua, setiap partisipan memiliki kesempatan yang sama untuk saling memengaruhi melalui argument mereka. Ketiga, kesuksesan ruang public dapat diukur dari tingkat akses dan otoritas, ketidakadaan hierarki, kualitas dari partisipan, dan peraturan hukum.

Sejalan dengan hal ini, penelitian dari Zaenudin juga menunjukkan bahwa kesuksesan ruang public dapat diukur melalui aksesibilitas yang artinya semua masyarakat dapat menjangkaunya, level otonomi yang artinya setiap individu yang berpartisipasi dapat bebas berpendapat tanpa ada tekanan, dan penolakan hierarki yang artinya semua partisipan ada pada level yang sama.⁵

Thomas Tokan dalam buku Komunikasi Politik menyebutkan Maswadi Rauf, seorang pakar politik menjelaskan bahwa komunikasi politik adalah objek kajian ilmu politik karena pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yakni berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan, dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukannya

⁵ Zaenudin dan Suwatno, "Ridwan Kamil's Digital Public Sphere and Public Policy."

sebagai pelaku kegiatan politik.⁶

Menurut Nahrul Hayat dalam buku *Komunikasi Politik* menjelaskan bahwa pesan dalam komunikasi politik ada dan berlangsung untuk mengikuti perubahan serta perkembangan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Komunikator dan partisipan dapat mengerti dengan jelas isi, tujuan, dan keinginan pesan yang disampaikan tersebut bertujuan untuk memengaruhi atau membentuk opini public.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan library research yang merupakan pendekatan dengan teknik pengumpulan data melalui sumber-sumber kepustakaan yang memiliki relevansi kajian penelitian dengan menggunakan indepth analysis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dengan mengumpulkan bahan kepustakaan yang relevan terhadap tema penelitian yaitu Teori Public Sphere dalam Komunikasi Politik. Teknik analisis data penelitian akan dilakukan dengan menggunakan teknik content analysis yang dapat menghasilkan uraian konklusi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian pertama berjudul *Ridwan Kamil's Digital Public Sphere and Public Policy* dari Zaenudin. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana Ridwan Kamil melakukan sosialisasi kebijakan public melalui ruang public digital khususnya Facebook, mengeksplorasi bagaimana gaya retorika Ridwan Kamil dalam mensosialisasikan kebijakan public, dan mengeksplorasi bagaimana pemilihan tematik dapat menarik perhatian masyarakat.⁸ Penelitian ini menggunakan analisis wacana sebagai metode untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis wacana mengacu pada pendekatan yang menggunakan teori interdisipliner terkait dengan ranah public digital, politik, kebijakan public, dan retorika.

Penelitian kedua berjudul *New Media, Contentious Politics, and Political Public Sphere in Iran* oleh Sohrabi. Penelitian ini membahas mengenai tantangan teknologi komunikasi baru seperti internet, smartpone, dan televisi satelit berpengaruh terhadap berfungsinya sistem politik otoriter dan ideologis Iran. Dengan fokus pada protes nasional yang melanda lusinan kota Iran pada 2017-2018 dan 2019, penelitian ini menjelaskan cara media baru telah mengintensifkan politik yang kontroversial dan memfasilitasi tindakan kolektif oposisi.⁹ Ini juga menunjukkan proses di mana internet telah memperluas, mendiversifikasi dan memperumit ruang publik politik

⁶ T. Tokan, *Komunikasi Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018).

⁷ N. Hayat, *Komunikasi Politik* (Jakarta: IAIN, 2019).

⁸ Zaenudin dan Suwatno, "Ridwan Kamil's Digital Public Sphere and Public Policy."

⁹ Hadi Sohrabi, "New Media, Contentious Politics, and Political Public Sphere in Iran," *Critical Arts* 35, no. 1 (2 Januari 2021), <https://doi.org/10.1080/02560046.2021.1887311>.

Iran dengan memberikan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada suara-suara yang berbeda untuk didengar di depan umum, dan dengan memungkinkan mereka untuk mengatur agenda untuk percakapan publik.

Penelitian ketiga berjudul *Three Dimensions of The Public Sphere on Facebook* oleh Dominik Batorski dan Ilona Grzywińska. Penelitian ini menganalisis mengenai ruang public online dalam tiga dimensi yang diperkenalkan oleh Dahlgren: struktural, representasional dan interaksional. Subjek utama analisis adalah Facebook khususnya aktivitas pengguna Facebook Polandia di Halaman Facebook partai politik dan politisi.¹⁰ Para peneliti menganalisis data tentang semua pengguna yang aktif di halaman tersebut selama dua periode 4 bulan Februari – Juni pada tahun 2013 dan 2015. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kuantitatif dari data yang dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix-method yang direkomendasikan untuk internet studies. Metode yang dipilih adalah analisis jaringan sosial, analisis cluster hirarki, dan regresi linear.

Penelitian keempat ditulis oleh Katharine Dommett and Peter J. Verovšek berjudul *Promoting Democracy in the Digital Public Sphere: Applying Theoretical Ideals to Online Political Communication*. Penelitian ini membahas mengenai debat demokratis yang telah mengalami transformasi struktural karena munculnya internet, media sosial, dan komunitas online. Penelitian ini menggunakan analisis empiris wacana online dalam menyoroiti keragaman tren yang terdeteksi oleh studi ruang public digital.¹¹ Penelitian ini berpendapat bahwa teori politik dan analisis empiris diperlukan untuk mempromosikan demokrasi dengan menggunakan model “Kedai Kopi” Jürgen Habermas.

Penelitian kelima adalah *Indonesia’s Rise in Digital Democracy and Youth’s Political Participation* oleh Muhammad Saud & Hendro Margono. Penelitian ini menerangkan bahwa platform media digital secara khusus telah membentuk kembali struktur politik Indonesia. Publik menggunakan aplikasi media sosial untuk partisipasi politik dan ekspresi opini politik mereka.¹² Penelitian ini dilakukan di Indonesia untuk mengkaji dampak media digital di kalangan anak mudah dan keterlibatan politik mereka melalui platform digital. Penelitian ini dipengaruhi oleh fenomena masifnya partisipasi mahasiswa yang terjadi pada Agustus 2019 di Indonesia sebagai reaksi terhadap undang-undang korupsi yang baru. Penelitian ini memilih teori ruang public

¹⁰ Dominik Batorski dan Ilona Grzywińska, “Three Dimensions of the Public Sphere on Facebook,” *Information, Communication & Society* 21, no. 3 (4 Maret 2018), <https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1281329>.

¹¹ Katharine Dommett dan Peter J. Verovšek, “Promoting Democracy in the Digital Public Sphere: Applying Theoretical Ideals to Online Political Communication,” *Javnost - The Public* 28, no. 4 (2 Oktober 2021), <https://doi.org/10.1080/13183222.2021.1955206>.

¹² Muhammad Saud dan Hendro Margono, “Indonesia’s Rise in Digital Democracy and Youth’s Political Participation,” *Journal of Information Technology & Politics* 18, no. 4 (2 Oktober 2021), <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>.

Jürgen Habermas yang memiliki korelasi dengan tujuan penelitian yaitu partisipasi pemuda dalam masalah politik untuk belajar dan mendiskusikan keyakinan bersama di ruang public. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik random sampling kepada 400 responden.

Ringkasan dari kelima penelitian tersebut dirangkum dalam tabel 1, untuk memudahkan membandingkan masing-masing jurnal penelitian.

Tabel 1 Literatur Terdahulu

No	Judul Penelitian dan Penulis	Teori Penelitian dan Penerapannya	Metode Penelitian
1	<i>Ridwan Kamil's Digital Public Sphere and Public Policy</i> Zaenudin, H.N & Suwatno, S. ¹³	Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana Ridwan Kamil melakukan sosialisasi kebijakan public melalui ruang public digital khususnya Facebook, mengeksplorasi bagaimana gaya retorika Ridwan Kamil dalam mensosialisasikan kebijakan public, dan mengeksplorasi bagaimana pemilihan tematik dapat menarik perhatian masyarakat. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa Ridwan Kamil sukses membentuk ruang public digital pada facebook.	Metode penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan analisis wacana.
2	<i>New Media, Contentious Politics, and Political Public Sphere in Iran</i> Sohrabi, Hadi. ¹⁴	Penelitian ini membahas mengenai tantangan teknologi komunikasi baru seperti internet, <i>smartphone</i> , dan televisi satelit berpengaruh terhadap berfungsinya sistem politik otoriter dan ideologis Iran. Dengan fokus pada protes nasional yang melanda lusinan kota Iran pada 2017-2018 dan 2019, penelitian ini menjelaskan cara media baru telah mengintensifkan politik yang kontroversial dan memfasilitasi tindakan kolektif oposisi. Ini juga menunjukkan proses di mana internet telah memperluas, mendiversifikasi dan memperumit ruang publik politik Iran dengan memberikan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada suara-suara yang berbeda untuk didengar di depan umum, dan dengan memungkinkan mereka untuk mengatur agenda untuk percakapan publik. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa negara ideologis seperti Iran sangat rentan terhadap arus bebas berita dan ide-ide yang difasilitasi oleh teknologi komunikasi baru.	Metode penelitian adalah critical interpretive.
3	<i>Three Dimensions of</i>	Penelitian ini menganalisis mengenai ruang	Metode yang

¹³ Zaenudin dan Suwatno, "Ridwan Kamil's Digital Public Sphere and Public Policy."

¹⁴ Sohrabi, "New Media, Contentious Politics, and Political Public Sphere in Iran."

No	Judul Penelitian dan Penulis	Teori Penelitian dan Penerapannya	Metode Penelitian
	<p><i>The Public Sphere on Facebook</i></p> <p>Batorski, Dominik & Grzywińska, Ilona.¹⁵</p>	<p>public onlinde dalam tiga dimensi: struktural, representasional dan interaksional. Subjek utama analisis adalah Facebook khususnya aktivitas pengguna Facebook Polandia di Halaman Facebook partai politik dan politisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil pengguna Facebook yang aktif dalam diskusi politik publik yang berlangsung di Halaman Facebook politik. Namun, tingkat keterlibatan tergantung pada peristiwa politik terkini yang terjadi di ruang publik offline, biasanya pengguna lebih aktif selama kampanye pemilu</p>	<p>digunakan pada penelitian ini adalah analisis kuantitatif dari data yang dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan <i>mix-method</i> yang direkomendasikan untuk <i>internet studies</i>. Metode yang dipilih adalah analisis jaringan sosial, analisis cluster hirarki, dan regresi linear.</p>
4	<p><i>Promoting Democracy in the Digital Public Sphere: Applying Theoretical Ideals to Online Political Communication</i></p> <p>Dommett, Katharine & Peter J. Verovšek.¹⁶</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai debat demokratis yang telah mengalami transformasi struktural karena munculnya internet, media sosial, dan komunitas online. Penelitian ini menggunakan analisis empiris wacana online dalam menyoroti keragaman tren yang terdeteksi oleh studi ruang public digital. Penelitian ini berpendapat bahwa teori politik dan analisis empiris diperlukan untuk mempromosikan demokrasi dengan menggunakan model “Kedai Kopi” Jürgen Habermas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ruang public digital merupakan seperangkat ruang kompleks yang pada praktiknya sangat bervariasi.</p>	<p>Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif</p>
5	<p><i>Indonesia’s Rise in Digital Democracy and Youth’s Political Participation</i></p> <p>Saud, Muhammad & Margono, Hendro.¹⁷</p>	<p>Penelitian ini menerangkan bahwa platform media digital secara khusus telah membentuk kembali struktur politik Indonesia. Publik menggunakan aplikasi media sosial untuk partisipasi politik dan ekspresi opini politik mereka. Penelitian ini dilakukan di Indonesia untuk mengkaji dampak media digital di kalangan anak mudah dan keterlibatan politik mereka melalui platform digital. Penelitian ini dipengaruhi oleh fenomena masifnya partisipasi mahasiswa yang terjadi pada Agustus 2019 di Indonesia sebagai reaksi</p>	<p>Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik random sampling kepada 400 responden</p>

¹⁵ Batorski dan Grzywińska, “Three Dimensions of the Public Sphere on Facebook.”

¹⁶ Dommett dan Verovšek, “Promoting Democracy in the Digital Public Sphere.”

¹⁷ Saud dan Margono, “Indonesia’s Rise in Digital Democracy and Youth’s Political Participation.”

No	Judul Penelitian dan Penulis	Teori Penelitian dan Penerapannya	Metode Penelitian
		terharap undang-undang korupsi yang baru. Penelitian ini memilih teori ruang public Jürgen Habermas yang memiliki korelasi dengan tujuan penelitian yaitu partisipasi pemuda dalam masalah politik untuk belajar dan mendiskusikan keyakinan bersama di ruang public. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemuda berpartisipasi dalam berbagai kegiatan termasuk undang-undang baru, serta turut memperkuat demokrasi dan berkontribusi pada struktur politik Indonesia.	

Pada penelitian pertama yaitu Ridwan Kamil's Digital Public Sphere and Public Policy dijelaskan bahwa Ridwan Kamil berhasil dalam membangun ruang public digital khususnya pada facebook. Hal ini dapat dilihat dari tiga factor suksesnya ruang public yaitu aksesibilitas, peniadaan level otonomi dan hierarki. Facebook merupakan sosial media yang dapat diakses secara bebas oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak ada batasan kelas sosial, artinya masyarakat dari kelas ekonomi bawah juga dapat terlibat aktif dalam diskusi dan memiliki kesempatan yang sama untuk didengarkan aspirasinya. Pada penelitian ini juga dinyatakan bahwa masyarakat bebas berpendapat tanpa ada tekanan. Dalam ruang public digital yang dibentuk oleh Ridwan Kamil tersebut, masyarakat bebas menyampaikan komentarnya. Tidak ada pihak yang akan menekan terkait komentar yang dikeluarkan oleh masyarakat. Ketiga, tidak ada hierarki dalam ruang public digital yang dibentuk oleh Ridwan Kamil. Semua masyarakat berada pada level yang sama untuk didengarkan dan ditanggapi komentarnya tanpa memandang latar belakang dari masyarakat tersebut.

Penelitian kedua menjelaskan bahwa Iran sangat rentan terhadap arus bebas berita dan ide-ide yang difasilitasi oleh teknologi komunikasi baru. Di Iran, setelah revolusi Islam 1979, negara menikmati hegemoni yang tak terbantahkan atas ruang publik selama sekitar tiga dekade. Aparat propaganda rezim berfungsi tanpa oposisi yang berarti: televisi dan radio milik negara mendominasi lanskap media dan pers diawasi dan disensor dengan ketat; buku teks dan kurikulum sekolah dipenuhi dengan ajaran agama dan ideologi anti-imperialis; ulama mengambil peran yang bervariasi di sekolah dan universitas; jutaan orang turun atau dibawa ke jalan pada beberapa kesempatan setiap tahun-mis. Hari Republik Islam, Hari Quds [anti-Zionisme], dan sejenisnya-untuk merayakan atau berdemonstrasi; Khotbah Jumat disiarkan di televisi di mana ulama konservatif membahas masalah budaya, agama, sosial dan politik; dan ruang publik telah didekorasi dengan lukisan dinding dan mural para pemimpin dan martir revolusi. Mereka yang tidak mengidentifikasi dengan wacana dominan yaitu sekelompok intelektual, akademisi, aktivis

masyarakat sipil, aktivis hak-hak perempuan, dan etnis minoritas-dipaksa ke dalam lingkaran tertutup dan pertemuan pribadi. Namun, sejak tahun 1990-an, dominasi negara atas wacana publik semakin digerogoti oleh media baru. Melalui media baru, oposisi dari dalam dan luar Iran menjadi pemain penting dalam membentuk opini public dan memengaruhi hasil pemilu.

Penelitian kedua ini menerangkan bahwa ruang public semula tidak ada di Iran. Namun, perkembangan dari teknologi komunikasi media baru memberikan ruang untuk public berbicara, berpendapat, dan menyatakan protes terhadap pemerintahannya. Dalam penelitian ini, fenomena yang diteliti lebih kompleks. Namun, dapat disimpulkan bahwa ruang public di media baru tidak terbentuk sesuai dengan syarat suksesnya ruang public. Artinya, masih ada penekanan dalam penyampaian opini, meskipun akses dan peniadaan level hierarki sudah terjadi pada ruang public di teknologi komunikasi media baru yang ada di Iran. Menariknya adalah bagaimana ruang public ini muncul sebagai suatu tanggapan dari keterbatasan ruang public itu sendiri.

Penelitian ketiga berjudul *Three Dimensions of The Public Sphere on Facebook* menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil pengguna Facebook yang aktif dalam diskusi politik publik yang berlangsung di Halaman Facebook politik. Namun, tingkat keterlibatan tergantung pada peristiwa politik terkini yang terjadi di ruang publik offline, biasanya pengguna lebih aktif selama kampanye pemilu. Penelitian ini menyampaikan bahwa Facebook tidak memberikan ruang publik alternatif bagi aktor politik yang kurang hadir di media mainstream. Partai dan politisi yang terlihat di media tradisional juga menarik penggemar aktif di media sosial (dimensi representasional). Meskipun demikian, kelompok-kelompok non-parlemen memiliki lebih banyak penggemar aktif di Facebook dibandingkan dengan penggemar mereka di media arus utama. Pada akhirnya, publik online di Facebook terfragmentasi dan mengelompok menjadi kelompok-kelompok politik yang homogen (dimensi interaksi), sehingga mendukung hipotesis 'ruang gema'. Divisi lebih kecil ketika ada lebih banyak pengguna yang terlibat secara signifikan. Namun, sebagian besar hubungan lintas sektor ini adalah hasil dari kampanye pemilu.

Penelitian keempat berjudul *Promoting Democracy in the Digital Public Sphere: Applying Theoretical Ideals to Online Political Communication* menunjukkan bahwa ruang public digital adalah seperangkat ruang kompleks yang praktiknya sangat bervariasi. Berdasarkan model normatif Habermas tentang kedai kopi, penelitian ini mengidentifikasi dua tolok ukur penting untuk diskusi publik: (1) beragam komunitas yang menyatukan individu dari seluruh masyarakat, dan; (2) pengetahuan umum yang tersedia untuk umum yang memungkinkan diskusi berlanjut melawan serangkaian fakta yang diterima bersama. Penelitian ini berpendapat bahwa wawasan teoretis dan empiris dapat digabungkan dengan baik untuk mempromosikan tanggapan terhadap tren masyarakat. Meskipun analisis pada penelitian ini berfokus pada demokrasi deliberatif dan ruang publik kedai kopi, argumen yang lebih luas mengenai perlunya fertilisasi silang tidak

terbatas pada tradisi yang satu ini, tetapi dapat digunakan untuk mempromosikan cita-cita demokrasi yang selaras dengan tradisi lain dalam teori demokrasi.

Penelitian kelima yang berjudul *Indonesia's Rise in Digital Democracy and Youth's Political Participation* menunjukkan bahwa pemuda berpartisipasi dalam berbagai kegiatan termasuk undang-undang baru, serta turut memperkuat demokrasi dan berkontribusi pada struktur politik Indonesia. Artinya, ruang public digital dalam hal ini terbentuk.

KESIMPULAN

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa public sphere terjadi dalam ranah komunikasi politik. Namun, dari kelima jurnal yang ditemukan, public sphere saat ini terjadi di ruang digital. Kelima penelitian yang ditemukan menjelaskan bahwa media sosial menjadi ruang baru untuk terbentuknya ruang public khususnya dalam komunikasi politik.

Jürgen Habermas yang menyatakan bahwa suksesnya ruang public terlihat dari adanya aksesibilitas yang dapat diakses oleh semua masyarakat, level otonomi yang artinya setiap individu yang berpartisipasi dapat bebas berpendapat tanpa ada tekanan, dan penolakan hierarki yang artinya semua partisipan ada pada level yang sama. Jika berdasarkan indikator dari Habermas tersebut, hanya jurnal pertama yang menyatakan ruang public berhasil terbentuk dalam komunikasi politiknya Ridwan Kamil. Keempat jurnal lainnya menyatakan bahwa pada prakteknya, ruang public jauh lebih kompleks dan bervariasi khususnya dalam komunikasi politik. Tidak ditemukan penelitian yang menunjukkan terbentuknya ruang public yang ideal dalam ranah komunikasi politik.

Penelitian ini menunjukkan ruang public dapat terjadi dalam ranah komunikasi politik. Jika sebelumnya ruang public lebih bersifat langsung, saat ini ruang public cenderung terbentuk pada ranah digital. Namun, pada prakteknya, jika disesuaikan dengan indikator yang dikemukakan oleh Habermas, hampir tidak ditemukan ruang public yang ideal dan memenuhi syarat seluruh indikator.

DAFTAR PUSTAKA

- Batorski, Dominik, dan Ilona Grzywińska. "Three Dimensions of the Public Sphere on Facebook." *Information, Communication & Society* 21, no. 3 (4 Maret 2018). <https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1281329>.
- Dommett, Katharine, dan Peter J. Verovšek. "Promoting Democracy in the Digital Public Sphere: Applying Theoretical Ideals to Online Political Communication." *Javnost - The Public* 28, no. 4 (2 Oktober 2021). <https://doi.org/10.1080/13183222.2021.1955206>.
- Habermas, Jurgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. MIT Press, 1991.
- Hayat, N. *Komunikasi Politik*. Jakarta: IAIN, 2019.

- Saud, Muhammad, dan Hendro Margono. "Indonesia's Rise in Digital Democracy and Youth's Political Participation." *Journal of Information Technology & Politics* 18, no. 4 (2 Oktober 2021). <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>.
- Sohrabi, Hadi. "New Media, Contentious Politics, and Political Public Sphere in Iran." *Critical Arts* 35, no. 1 (2 Januari 2021). <https://doi.org/10.1080/02560046.2021.1887311>.
- Subiakto, H., dan R. Ida. *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Jakarta: Prenamedia Group, 2012.
- Tokan, T. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Zaenudin, H N, dan S Suwatno. "Ridwan Kamil's Digital Public Sphere and Public Policy." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 145 (April 2018): 012007. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/145/1/012007>.